

# Peran Pemerintahan Desa Dinoyo Mojokerto Dalam Mewujudkan Birokrasi Yang Profesional Dan Bersih

Hikmah Muhaimin<sup>1</sup>, Arif Rochman<sup>2</sup>, Faisal Mubarok<sup>3</sup>, Risky Abi Setiawan<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Majapahit

[hikmahmuhaimin@gmail.com](mailto:hikmahmuhaimin@gmail.com), [arifrochman191@gmail.com](mailto:arifrochman191@gmail.com), [faisalmubarok2403@gmail.com](mailto:faisalmubarok2403@gmail.com), [riskyabisetiawan@gmail.com](mailto:riskyabisetiawan@gmail.com)

---

## Kata Kunci:

Etika Pemerintahan,  
Birokrasi,  
Profesional

**Abstrak:** Fungsi utama dari aparatur pemerintah adalah mengabdikan pada masyarakat dan pada kepentingan umum. Dalam melayani kepentingan umum, aparatur pemerintah sebagai abdi, bukan mencari keuntungan atau mementingkan kepentingan pribadi atau golongan. Aparatur pemerintah menjadi saluran dan jembatan pengabdian dalam melaksanakan kepentingan umum dengan penuh dedikasi dan loyalitas. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, aparat pemerintah harus tanggap terhadap perubahan yang setiap saat terjadi di kalangan masyarakat. Inti dari etika pemerintahan adalah penggunaan kekuasaan (The use of power). Etika pemerintahan harus ada partisipasi yang intensif dengan masyarakat harus ditanggapi segala keinginan yang ada di masyarakat. Dalam hal ini, penguasa harus dapat menstimulus partisipasi ini memang sulit karena keinginan individu yang beraneka ragam. Dalam mengintensifkan partisipasi yang fleksibel bagi pemerintah. Sebab yang diperhatikan bukan yang memerintah tapi yang diperintah. Fungsi Etika Pemerintahan sangat penting guna mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih, aparat yang beretika seharusnya mampu menghadirkan suasana dan budaya kerja yang profesional dan kredibel. Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan etika pemerintahan di Desa Dinoyo Kabupaten Mojokerto guna terwujudnya Birokrasi yang profesional dan bersih. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif.

## Keyword:

Government Ethics,  
Bureaucracy,  
Professional

**Abstract:** The main function of the government apparatus is to serve the community and to the public interest. In serving the public interest of the government apparatus as servants, not seeking profit or prioritizing personal interests or groups. The government apparatus becomes a channel and bridge of service in carrying out the public interest with full dedication and loyalty. In carrying out their duties and functions, government officials must be responsive to changes that occur at any time among the community. The essence of governance ethics is the use of power. Government ethics must have intensive participation with the community, must be responded to all desires that exist in the community. In this case, the ruler must be able to stimulate participation, this is indeed difficult because of the diverse desires of individuals. In intensifying flexible participation for governments. For what is noticed is not the one who rules but the one who is ruled. The function of Government Ethics is very important in order to create a professional and clean bureaucracy, ethical officers should be able to present a professional and credible work atmosphere and culture. This study aims to find out about how the implementation of government ethics in Dinoyo Village, Mojokerto Regency in order to realize a professional and clean bureaucracy. This research uses qualitative research methods.

## PENDAHULUAN

Etika adalah landasan berpikir bertindak sebagai administrator sistem Pemerintah. Jika masyarakat umum tidak puas dengan layanannya diberikan oleh pejabat pemerintah, mereka kemudian menuntut nilai atau standar etika apa itu digunakan oleh petugas dalam memberikan pelayanan karena etika pemerintahan selalu berlaku merupakan masalah yang berkelanjutan keprihatinan serius. Etika pemerintahan menjadi topik pembicaraan hari ini terutama ketika mencoba membuat perangkat pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Tentang pengembangan Pejabat pemerintah memberikan instruksi bahwa “pengembangan aparatur pemerintahan Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dan efektivitas semua tindakan pencegahan organisasi manajemen, termasuk perbaikan keterampilan dan disiplin, komitmen, keteladanan dan kesejahteraan para pejabatnya, jadi lebih efisien secara keseluruhan menjalankan tugas pemerintahan terutama pengembangan terbaik dalam melayani, juga dalam merawat untuk mendorong inisiatif dan peran aktif dalam perkembangan masyarakat sesuai dengan minat dan keinginan Memahami pentingnya etika Pemerintah.

Dan pejabat pemerintah tahu apa yang diperbolehkan dan tidak dilakukan (baik-buruk; benar-salah), tetapi lebih adalah kelangsungan hidup meningkatkan profesionalisme pesanan tindakan dan perilakunya mencerminkan refleksi etis yang bermanfaat untuk meningkatkan layanan bagi masyarakat yang menciptakan birokrasi dewan yang bersih dan profesional. Penegakan etika dewan oleh pejabat pemerintah langsung ke administrasi negara. Manajemen sedang bekerja lancar dan berhasil ketika perilaku perangkat Birokrasi menjalankan tugasnya atas dasar nilai-nilai etis. Dan sebaliknya, administrasi akan terhambat dan bermasalah dalam perilaku Pejabat menyimpang dari nilai-nilai Etika, etika pemerintahan yang dikelola Birokrasi pemerintah memiliki dampak Manajemen tingkat pusat serta manajemen di daerah, subdaerah dan bahkan di tingkat pedesaan. Desa Dinoyo Mojokerto adalah lembaga birokrasi bagi dalam menjalankan tugasnya Kepala desa dibantu oleh sebuah alat pemerintah desa sebagai struktur organisasi kerja pengurus Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan temuan sebelumnya dalam realisasi fenomena yang diamati oleh peneliti birokrasi kecamatan yang profesional ketertiban dalam melaksanakan tugas manajemen dan layanan

Berdasarkan fenomena yang terjadi dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dapat dilihat bahwa aparatur pemerintah terutama di desa Dinoyo diduga masih memiliki kualitas yang belum baik dalam melaksanakan tugasnya. Rendahnya kualitas aparatur pemerintah (birokrat), berdasarkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat untuk mendapatkan birokrasi yang profesional dan bersih, dan berdampak pada : kurang patuh aparat pemerintah, penyalahgunaan tanggung jawab, suka menunda dalam berbagai tugas. Dari uraian tersebut dapat mempengaruhi pelaksanaan birokrasi yakni pencapaian tujuan, pengambilan keputusan,

serta penentuan kebijakan pemerintah. Dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih, untuk memahami peran pemerintah desa Dinoyo Mojokerto terdapat beberapa teori yang relevan. Dengan memahami teori tersebut pemerintah desa Dinoyo dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kualitas birokrasinya. Salah satunya berfokus menekankan pentingnya tata kelola yang baik dan upaya transformasi sistem birokratik menuju efektivitas dan kualitas layanan publik yang lebih baik, penerapan teori tersebut sangat relevan dalam mewujudkan birokrasi yang profesional dan bersih

Max Weber (1947:337) berpendapat bahwa sumber utama dalam sebuah manajemen birokrasi pemerintah terletak pada teknis yang telah menjadi esensial melalui cara kita bekerja dalam perkembangan teknologi modern. Selain itu manajemen birokrasi memiliki peran utama menerapkan kontrol berbasis pengetahuan. Pengetahuan merupakan karakteristik yang membuat birokrasi menjadi rasional. Birokrasi unggul dalam mengetahui teknis dan pengetahuan tentang fakta-fakta konkret dalam bidangnya sendiri. Dandalam hal birokrat profesional, calon pejabat birokrasi dipilih. Dari semua itu, pembaca dapat menggambarkan birokrasi yang disebut Weber, sebagai bentuk birokrasi yang paling rasional.(Weber, 1947)

#### **METODE**

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan observasi langsung terhadap aktivitas pemerintah desa, Fokus penelitian ini adalah pada etika pemerintah dalam menciptakan birokrasi pemerintahan desa yang bersih dan profesional, dengan teori ini ungkap Mertins, Krisyanto (2001:24-25) untuk menciptakan kejujuran profesional petugas, Informan yang disaring diklasifikasikan, yaitu ; Sekretaris Desa, serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Selain itu, Penulisan ini menggunakan beberapa teknik Pengumpulan data, yaitu: persepsi, Wawancara, penelitian literatur. Setelah informasi yang diperlukan diperoleh dalam proses pendataan kemudian diolah dan dianalisis Informasi. Menurut Matius B. Miles dan A.Michael Huberman (prof. Dr. Sugiyono, 2017) berkata: "Aktivitas dianalisis.

#### **HASIL DAN DISKUSI**

Etika pejabat pemerintah di Desa Dinoyo dijelaskan pada bagian Latar Belakang penelitian ini bahwa pejabat pemerintah merupakan posisi yang sangat penting organisasi pemerintah daerah Pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, melalui Oleh karena itu, etika pejabat pemerintah itu baik penting untuk menyelesaikan tugas prinsip dan misi. etika perangkat Pemerintah harus membantu staf untuk meningkatkan kualitas dan luasnya birokrasi pemerintah kawasan bersih dan profesional, Itulah sebabnya bagian ini membahas topik tersebut etika internal pemerintahan Desa Dinoyo melakukan diskusikan upaya pemerintah untuk meningkatkan etika agar bisa untuk membentuk birokrasi pemerintahan desa bersih dan profesional. Untuk membuat perangkat pemerintah yang berdedikasi kualitas tinggi dan

profesionalisme sadar akan tanggung jawab dan tugas menjalankan tugas pemerintahan dalam segala bidang di era globalisasi Otonomi daerah, diperlukan efisiensi dan prestasi kerja dalam menjalankan semua tugas pemerintahan yang harus dilaksanakan

Pemerintahan daerah sendiri dapat berjalan dengan baik. Banyak hal untuk bersaingdirancang untuk pejabat pemerintah, kebijakan perdagangan umum Pengembangan berlangsung melalui perangkat keras, terutama melalui pengembangan sumber daya perangkat itu sendiri, di mana perangkat pemerintah dalam hal ini PNS Status (ASN) sebagai Administrator pemerintah, sebagai abdi dan pelayan pemerintah Masyarakat benar-benar perlu campur tangan dalam menjalankan tugas direksi, untuk menawarkan layanan maksimal memberikan gambaran umum tentang pelaksanaannya Tugas Aparatur Pemerintah di desa Dinoyo dapat dikenali dari perilaku perangkat sebuah pemerintahan yang merupakan citra petugas melakukan pekerjaannya. Perilaku kerja ini dapat dijelaskan kinerja perangkat di lapangan atau di sisi ini Perilaku fungsional perangkat internal Pelaksanaan tugas di semua bidang terutama dalam pemeliharaan Manajemen diukur dan dievaluasi terhadapnya hasil pekerjaan yang dicapai itu semua tergantung moral yang dimiliki seseorang

Hasil wawancara dengan informan berkata "Petugas (pegawai) di kantor desa Dinoyo biasanya menunjukkan sikap dan perilaku yang baik seperti ketaatan, disiplin dll, meskipun dalam beberapa kasus Perilaku karyawan adalah hal biasa Bahkan mereka yang datang terlambat ke kantor pun menyukainya menunda bekerja dengan orang yang berbeda Alasannya, biasanya kalau ada pejabat yang jadi saya sebagai camat langsung Penyediaan pelatihan untuk individu". Berdasarkan informasi ini Fakta yang tersedia mengkonfirmasi hal itu Kurangnya kontrol perangkat internal Itu di subdivisi desa Dinoyo, jadi hal-hal ini menjadi keluhan di masyarakat tidak Pemerintahan saat ini mengetahuinya secara dekat di desa Dinoyo Pejabat pemerintah tentu saja melakukannya posisi dan peran yang sangat penting dengan demikian menentukan mencapai penyelenggaraan pemerintahan Tujuan manajemen, efisiensi dan efektifitas organisasi pemerintahan, proses administrasi hanya dapat dilakukan secara efektif dan efisien. efektif ketika orang mendukungnya Pelaksana yang berkualitas, khususnya kepada pejabat pemerintah sebagai pelaksana terutama etika dan moral. Dalam menjalankan tugas direksi, maka pekerjaan pembangunan kualitas aparatur administrasi harus dijaga dan dibiayai selama ini, untuk pembangunan aparatur pemerintah pada umumnya akan terus dilaksanakan dan dipantau Meningkatkan kualitas, efisiensi dan efektifitas semua perjanjian administrasi, termasuk peningkatan kapasitas dan Disiplin, komitmen, keteladanan dan terutama kesejahteraan perangkat melayani, memelihara dan tumbuh Inisiatif dan peran dalam implementasi dia bekerja Regulasi dalam Ilmu Pemerintahan yang memandu pengaturan dan basis bertindak dan berperilaku atas nama perangkat atau pemerintah disebut dalam etika

pemerintahan. Sampai sekarang banyak undang-undang yang mengatur dan menjadi Petunjuk tentang pengaturan dan perilaku perangkat

Berkaitan dengan sikap dan perilaku aparatur perangkat desa Dinoyo dalam kaitannya dengan aspek etika pemerintah dengan beberapa Penelitian sebagai tolak ukur dapat digambarkan dengan menggunakan hasil sebagai berikut Itu:

### **Equality**

Untuk menyediakan layanan masyarakat, pejabat pemerintah Diharapkan bisa memberikan pelayanan sangat baik dan maksimal untuk semua pihak tanpa memandang status sosial, posisi politik atau bahkan kerabat. kekhawatiran Hal yang sama berlaku untuk layanan yang diberikan Pejabat pemerintah selalu mendesak kecemburuan sosial yang dapat menimbulkan konflik selain efisiensi dan efisiensi kerja perangkat itu sendiri pada dasarnya Setiap orang berhak atas manfaat yang sama baik dari pejabat pemerintah

### **Equity**

keadilan atau perlakuan yang adil tentang pemenuhan tugas penyelenggaraan pemerintah sangat penting karena akan begitu menimbulkan efek negatif lembaga pemerintah itu sendiri. Untuk masyarakat majemuk seperti Indonesia Terkadang membutuhkan perlakuan yang adil dan perlakuan yang sama dalam memberi Layanan dan terkadang berbeda adil tetapi tidak diperlakukan sama kepada orang-orang tertentu.

### **Loyalty**

Setiap pejabat pemerintah akan dituntut kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, untuk pengawas dan rekan kerja Berbagai jenis kesetiaan atau loyalitas benar-benar sejenis kesetiaan atau loyalitas tertentu mengabaikan orang lain. Misalnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, misalnya, harus patuh Semua jam kerja sesuai dengan peraturan memang seseorang harus setia kepada hukum dan Konstitusi harus setia dan patuh tentang Pancasila dan UUD 1945.

### **Responsibility**

Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat harus menahan diri Anggapan "Saya hanya mengeksekusi Perintah atasan sebagai bentuk tanggung jawab Tanggung jawab untuk bekerja." Jadi dalam hal ini Akan ada banyak perawatan untuk perangkat tentang keberhasilan pekerjaan. Karena dalam pelaksanaan tugas atau pekerjaan alat hanya berdasarkan prinsip hanya menjalankan perintah atasan, tidak menutup kemungkinan pekerjaan tidak akan sempurna.

## **KESIMPULAN**

Jadi berdasarkan hasil penelitian Beberapa kesimpulan dapat ditarik sebagai berikut: Perilaku aparatur pemerintah sudah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya setiap hari di kantor desa dinoyo, berdasarkan penelitian Yang diamati adalah aparatur etika/moral apalagi

masih relatif rendah untuk memberikan pelayanan kepada mereka yang Butuh perawatan jadi belum biasa dikatakan membentuk birokrasi pemerintahan desa dinoyo yang profesional

Equality, Equity, Loyalty, dan responsibility, ataupun sikap moral pejabat pemerintah masih tergolong rendah, dengan alasan merupakan karakter moral setiap orang tidak terlalu baik untuk melakukan Kebutuhan/kesejahteraan pegawai mempengaruhi kinerja perangkat. Saat menjalankan tugas pemerintah, kebanyakan aparatur Pemerintah Desa dinoyo adalah untuk memahami, bahkan mematuhi prinsip-prinsip etika pemerintah untuk meningkatkan kualitas desa tersebut, meskipun jumlahnya masih sedikit yang masih belum paham dan belum paham menerapkan etika pemerintahan. Tetapi penelitian ini memeberikan gambaran tentang upaya dan keberhasilan pemerintah desa Dinoyo dalam mencapai tujuan tersebut.

### REFERENSI

- Gordon, Thomas, 1986, *Kepemimpinan Yang Efektif*, Rajawali Perss, Jakarta
- Kansil, C.S.T, 1990, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Radar Jaya Offset , Jakarta.
- Syaffie, Kencana Ibnu, 1994, *Etika Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Siagian, Sondang, 1999, *Manejemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara Jakarta.1994, *Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku*, Bumi Aksara, Jakarta.
- "Reformasi Birokrasi pada Pemerintahan Desa: Studi Kasus di Desa Dinoyo, Kabupaten Mojokerto" oleh Aisyah Rizki Maulida (2019) - Simposium Nasional Akuntansi Keuangan Publik.
- "Peran Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Birokrasi Desa: Studi Kasus di Desa Dinoyo, Kabupaten Mojokerto" oleh Ahmad Rifai (2018) - Konferensi Nasional Sistem Informasi.
- Naqiah, A., & Zitri, I. (2023). Collective Action Kelompok Sadar Wisata Desa Malaka Dalam Percepatan Pariwisata Guna Peningkatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 3(1), 1-14.
- Astuti, P., Ashari, W. K., Ouktafia, F., Wahyudi, D., Jailani, M. A., & Zitri, I. (2023). Strategi Peningkatan Daya Tarik Di Destinasi Tanjung Bias Desa Senteluk Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Paradigma (Jp)*, 12(2).
- Rahman, A. F. B., & Zitri, I. (2023). Collaborative Governance Dalam Perkembangan Pariwisata Di Kawasan Senggigi Kabupaten Lombok Barat. *Nusantara Hasana Journal*, 3(2), 144-159.
- "Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Pemerintah Desa: Analisis Perannya terhadap Birokrasi yang Profesional dan Bersih di Desa Dinoyo, Kabupaten Mojokerto" oleh Rina Nurul Azizah (2017) - *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* Vol. 9 No. 1.
- prof. Dr. Sugiyono. (2017). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. ikatan
- Weber, M. (1947). *BIROKRASI PEMERINTAH* (S. Hikmah Muhaimin (ed.)).